

# OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAMBI MENERIMA 31 LAPORAN PENYALURAN BANSOS DI PROVINSI JAMBI

Jum'at, 12 Juni 2020 - Korinna Al Emira

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ombudsman RI Perwakilan Jambi mencatat ada 31 laporan masyarakat terkait penyaluran (JPS) di Provinsi Jambi bermasalah.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Jafar Ahmad mengatakan laporan tersebut bersal dari tiga kabupaten/kota di sebanyak 1 laporan, kemudian 3 laporan di Kabupaten Muarojambi dan Kota Jambi sebanyak 27 laporan masyarakat.

"Mereka yang melapor itu sebagian ada yang salah sasaran, dan sebagian mereka yang tak mendapatkan layanan," kata dia

Lanjutnya, untuk yang salah sasaran tersebut, Jafar menyebutkan bahwa terdapat kesalahan data atau kekeliruan data seperti yang diterima oleh masyarakat namun, ketika hendak diambil datanya tak keluar, sehingga harus diperbaiki.

"Namun sudah dikembalikan datanya oleh Kemensos, jadi pada prinsipnya laporan tersebut telah selesai di pemkab masing-masing."

Kata Jafar, persoalan tersebut sudah didistribusikan yang diserahkan secara langsung ke Gugus Tugas Covid-19 kabupaten/kota yang sudah difasilitasi untuk kembali mendapatkan bantuan.

"Sepanjang mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik ya tidak ada sanksi," sebutnya.

Sementara itu, meski ada 31 laporan terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, namun Ombudsman RI masih keberpihakan antara kepala desa dengan keluarga dan lain sebagainya.

"Kalau kabar dan berita memang banyak, namun laporannya yang belum ada," ungkapnya.

Kemudian juga, Jafar mengimbau kepada Pemda Kabupaten Kota dan Provinsi Jambi untuk benar-benar memilah dan memprioritaskan masyarakat yang berhak menerima.

Pasalnya, untuk saat ini yang banyak bermasalah tersebut yakni perolehan data penerima.

Barang kalai ada masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu dan ada yang sama sekali tak mendapatkan bantuan. Ini yang menjadi permasalahan.

"Saya lihat Pemda ini masih bermasalah dengan data, namun kejadian seperti ini tak hanya di Jambi saja, Provinsi lain juga sama."

Selain itu, tak hanya inspektorat yang melakukan pengawasan pegawai dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, media juga ikut memantau dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut.

Pasalnya dalam penyalurannya sendiri banyak cara dan banyak orang yang beragam, sehingga jika ada salah satu niatan yang tak tepat.

"Jika masyarakat merasa ada keluhan terkait penyaluran bansos ini, segera laporan ke Ombudsman. Ini agar dapat ditelusuri persoalan tersebut," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di [Tribunjambi.com](http://Tribunjambi.com) dengan judul Ombudsman RI Perwakilan Jambi Menerima 31 Laporan P

Penulis: Zulkifli

Editor: Rian Aidilfi Afriandi